



IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Sri Handayani¹, Agus Joko Purwanto², Rulinawaty³

¹Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
srihandayanijuni@gmail.com

²Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
ajoko@ecampus.ut.ac.id

³Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
ruly@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries affected socially and economically by the global Covid-19 pandemic which has hit the world since early 2020 (Hidayat, 2021). This condition prompted the government to issue a Direct Cash Assistance (BLT) policy to help people overcome the financial impact of the pandemic. This assistance is given to families who are registered in a predetermined database, such as a Family Card (KK) or verified poor family data. This study aims to analyze and evaluate the implementation of BLT Program policies during the Covid-19 pandemic in South Solok Regency. This research is a qualitative research using the Van Meter and Van Horn models as an analytical framework. Primary and secondary data collection is done through interviews, documentation and observation. The informants came from the PMD Social Services, Districts, and Nagari government officials. In conducting data analysis, the Nvivo 12 Pro program was used. The results showed that the implementation of the BLT Program was influenced by several factors, including the bureaucratic structure, resources, communication, disposition, social environment, economy, and politics. The conclusion of the study shows that the BLT is running well and effectively. The recommendations include increasing access to transportation, improving road infrastructure, increasing the aid quota, increasing communication and coordination, digitizing document management, evaluating and routine monitoring.

Keywords: Implementation, Direct Cash Transfer (BLT), Covid-19

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak secara sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi global Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 (Hidayat, 2021). Kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat mengatasi dampak finansial akibat pandemi. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga atau individu yang terdaftar dalam basis data yang telah ditetapkan, seperti Kartu Keluarga (KK) atau data keluarga miskin yang telah terverifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan Program BLT pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informan berasal dari Dinsos PMD, Kecamatan, dan aparat pemerintahan



Nagari. Dalam melakukan analisis data digunakan program Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BLT di Kabupaten Solok Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa BLT di Kabupaten Solok Selatan berjalan dengan baik dan efektif. Adapun rekomendasi diantaranya meningkatkan akses transportasi, memperbaiki infrastruktur jalan, peningkatan kuota bantuan, peningkatan komunikasi dan koordinasi, digitalisasi pengurusan dokumen, evaluasi dan pemantauan rutin. Dengan langkah yang tepat, BLT diharapkan berdampak signifikan dalam mengurangi beban akibat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Covid-19.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak secara sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi global Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 (Hidayat, 2021). Hampir sebagian besar sektor usaha lumpuh sehinggamenyebabkan banyakorang menjadikehilangan pekerjaan karenahilangnya lapangan pekerjaan. Apabila keadaan ini berlangsung lama dan tidak segera diatasi dengan baik, dikhawatirkan dapat memicukondisisosialyang memburuk. Pandemi membuat tingkat perekonomian masyarakat turun drastis, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Walaupun dampak yang terbesar lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, namun mengingat para pekerja memiliki mobilitas cukup tinggi, bolak-balik dari desa ke kota dan kembali ke desa, yang memungkinkan wabah Covid-19 juga bisa menyebar di desa (TNP2K, 2020). Melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya yaitu APBD, desa diharapkan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi terutama untuk ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi. Untuk mengatasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Untuk mengatasi konsekuensi negatif dari pandemi ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program BLT (Khotimah et al., 2022; KOMPAK, 2021; Kurniawan, 2020). Program BLT merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga atau individu yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pendapatan atau terdampak secara signifikan oleh penurunan aktivitas ekonomi, pengangguran, atau berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus (Ilhamdatun, 2021). Implementasi BLT Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga atau individu yang terdaftar dalam basis data yang telah ditetapkan, seperti Kartu Keluarga (KK) atau data keluarga miskin yang telah terverifikasi. Penelitian terkait implementasi BLT pada masa pandemi Covid-19 telah memperoleh perhatian dari beberapa peneliti seperti (Agustina & Hendra, 2021; Khotimah et al., 2022; KOMPAK, 2021; Kurniawan, 2020; Nurahmawati & Hartini, 2020; Rahman & Kisworo, 2021; Sasuwuk et al., 2021; Wayan Mastana et al., 2022; Windarti, 2022). Sebagian meneliti BLT sebagai salah satu komponen dari kebijakan publik (Ilhamdatun, 2021; Mukarrama, 2022; Nirwana et al., 2022; Rahman & Kisworo, 2021). Terdapat juga beberapa yang melakukan penelitian terkait hambatan dalam pelaksanaan bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi pandemi



(Rahmansyah et al., 2020).

Beberapa peneliti seperti Anjarwati et al., 2021; Fitriani et al., 2022; Maulya et al., 2023; Redana & Supratta, 2022; Saputra et al., 2022 melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan BLT pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan peneliti lainnya menguji dan mengevaluasi efektifitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai pada masa pandemi Covid-19 baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa (Ansyari et al., 2021; Firmansyah & Fanida, 2022; Khotimah et al., 2022; Nafiah & Bharata, 2021; Prihandini, 2021; Suparman et al., 2021; Syahid Jayana et al., 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan Program BLT pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi efektivitas program, dan mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas program serta mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif atas kebijakan publik menggunakan model Van Meter dan Van Horn, yang memiliki 6 (enam) variabel atau subfokus yaitu standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi/sosialisasi, disposisi/sikap pelaksana, dan lingkungan sebagai kerangka analisis (Agustina & Hendra, 2021; Sasuwuk et al., 2021; Windarti, 2022). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau dari informan atau diperoleh dari pengamatan (observasi, wawancara, dokumentasi). Pada penelitian ini observasi dilakukan pada program BLT yang berlangsung pada masa pandemi Covid-19. Objek yang diobservasi adalah pelaksana program BLT yang terdiri dari Wali Nagari (Kepala Desa), Bamus Nagari, dan aparat desa yang terkait pemberian BLT dalam hal ini Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), serta penerima BLT tersebut. Adapun observasi dilakukan penulis pada saat pembagian BLT di beberapa Nagari salah satunya di Nagari Pasar Muaralabuh dan Nagari Pasir Talang Selatan. Wawancara akan dilakukan setelah proses pencairan BLT, bertempat di Kantor Dinsos PMD, Kantor Camat, dan Kantor Wali Nagari. Sebagian wawancara lakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Dokumentasi yang digunakan adalah Surat Keputusan Bupati, data penduduk miskin, dan data yang relevan lainnya.

Sumber Informasi yang digunakan adalah data yang ada pada Bagian Kesra Desa, Bagian Kesra Kantor Camat, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Solok Selatan. Informan yang akan digunakan adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Sekretaris Dinsos PMD, Camat se Kabupaten Solok Selatan, Kasi Kesra Kecamatan se Kabupaten Solok Selatan, Wali Nagari (Kepala Desa) perwakilan masing-masing kecamatan. Jumlah informan diperkirakan 37 orang. Untuk menganalisa data digunakan Analisis NVIVO 12 Pro sebagai alat analisis konseptual pada data.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2031, secara geografis

daerah ini berada pada $01^{\circ} 17' 13'' - 01^{\circ} 46' 45''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 53' 24'' - 101^{\circ} 26' 27''$ Bujur Timur, tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, sejak tahun 2007 Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Sangir merupakan kecamatan terbesar dan Pauh Duo adalah kecamatan terkecil. Saat ini Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 nagari dan 269 Jorong.

Pemerintah melalui BPS telah menetapkan 14 indikator kemiskinan, dimana apabila terpenuhi 9 dari 14 indikator tersebut, maka sudah bisa digolongkan sebagai masyarakat miskin, yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi indikator kemiskinan dari BPS tersebut. Data penduduk miskin di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah
1	Koto Parik Gadang Diateh	1. Pakan Rabaa	394
		2. Pakan Rabaa Utara	800
		3. Pakan Rabaa Timur	597
		4. Pakan Rabaa Tengah	837
		Jumlah	2.628
2	Sungai Pagu	1. Koto Baru	359
		2. Pasar Muara Labuh	123
		3. Pulakek Koto Baru	339
		4. Sako Pasia Talang	30
		5. Pasir Talang	266
		6. Bomas	406
		7. Sako Selatan Pasir Talang	156
		8. Sako Utara Pasir Talang	240
		9. Pasir Talang Selatan	178
		10. Pasir Talang Barat	315
		11. Pasir Talang Timur	252
	Jumlah	2.764	
3	Pauh Duo	1. Alam Pauh Duo	960
		2. Kapau Alam Pauh Duo	268
		3. Luak Kapau Alam Pauh Duo	450
		4. Pauh Duo Nan Batigo	323
	Jumlah	2.001	
4	Sangir	1. Lubuk Gadang	1.181
		2. Lubuk Gadang Timur	909
		3. Lubuk Gadang Selatan	1.193
		4. Lubuk Gadang Utara	331
	Jumlah	3.614	
5	Sangir Jujuan	1. Lubuk Malako	276
		2. Padang Air Dingin	234



	3. Bidar Alam	228
	4. Padang Limau Sundai	155
	5. Padang Gantiang	86
	Jumlah	979
6 Sangir Balai Janggo	1. Sungai Kunyit	268
	2. Talunan Maju	278
	3. Talao Sungai Kunyit	190
	4. Sungai Kunyit Barat	289
	Jumlah	1.025
7 Sangir Batang Hari	1. Abai	354
	2. Ranah Pantai Cermin	184
	3. Dusun Tengah	162
	4. Sitapus	161
	5. Lubuk Ulang Aling	113
	6. Lubuk Ulang Aling Selatan	69
	7. Lubuk Ulang Aling Tengah	122
	Jumlah	1.165
Jumlah		14.176

Sumber: BPS Solok Selatan, 2020

Dari Tabel 1 di atas memperlihatkan penyebaran jumlah penduduk miskin pada masing-masing nagari dan kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Sangir dan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit berada di Kecamatan Sangir Jujan.

Faktor pendukung Keberhasilan (Efektivitas Pelaksanaan) Penyaluran BLT Covid-19

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel atau sub fokus sebagaimana teori Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta lingkungan sosial ekonomi dan sosial politik. Keberhasilan implementasi kebijakan BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

Standar dan Sasaran serta Tujuan Kebijakan yang jelas

Standar mengacu pada seperangkat kriteria atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, serta dapat mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas, efisiensi, kesetaraan, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan. Standar membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan telah berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan adalah arah atau hasil yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan publik, mencerminkan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dari implementasi kebijakan tersebut.

Standar dan sasaran serta tujuan kebijakan BLT dana desa pada masa pandemi covid-19 sudah jelas, yaitu masyarakat miskin, menderita penyakit menahun, serta kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ditambah dengan belum/tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah. Dengan jelasnya siapa sasarannya, implementasi BLT berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dari beberapa informan, walaupun dari proses pendataan didapatkan adanya data ganda warga penerima bantuan sejenis seperti PKH, namun setelah diverifikasi dan disandingkan dengan DTKS dan diputuskan melalui musyawarah desa, hanya satu yang boleh dicairkan. Hal ini terjadinya pun tidak di semua nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan, hanya segelintir saja. Demikian juga dengan tujuan dari program BLT pada masa pandemi ini sudah jelas, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 18 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat Terdampak Akibat Pandemi Covid-19.

Sumber Daya

Dari observasi yang peneliti lakukan, sumber daya manusia yang terlibat sebagai aktor pelaksana program BLT Dana Desa cukup baik. Adapun mereka yang terlibat dari awal dilaksanakannya program ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya Camat beserta jajaran, serta aparat pemerintah nagari dan tim pendamping desa yang sangat membantu dalam setiap proses. Mulai dari tahapan sosialisasi, pendataan yang langsung melibatkan Wali Jorong dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), tenaga pendamping desa serta bantuan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/Taruna Siaga Bencana. Apalagi pada saat penyaluran atau pencairan dana BLT, di beberapa Nagari yang berada di pusat kecamatan ada yang mendapat bantuan dari pegawai Bank Nagari yang terjun langsung membagikan BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Perbup Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan Bank Nagari menyalurkan kepada penerima bantuan sesuai data dari Dinas Sosial dan PMD. Sehingga tim yang ada di nagari sangat terbantu karena tidak perlu mereka yang membagikan BLT karena langsung diberikan oleh petugas Bank. Dalam penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan, pengelolaan sumber daya yang baik menjadi kunci keberhasilan. Dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta sistem informasi yang handal, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Disamping sumber daya manusia yang ikut menentukan berhasilnya suatu program, sumber daya lain seperti ketersediaan anggaran/dana juga ikut menentukan. Besaran Bantuan Tunai yang diberikan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Perbup Nomor 18 tahun 2020 adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.

Sosialisasi/Komunikasi

Dari informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara dan observasi, mulai dari Dinas Sosial PMD sampai ke aparat pemerintah Nagari yang berada di lini terdepan berhadapan dengan masyarakat sebagai penyalur BLT dana desa, komunikasi berjalan dengan baik. Melalui komunikasi yang baik ini, akan meminimalisir terjadinya kesalahan baik pada waktu pendataan untuk menetapkan keluarga sasaran penerima BLT, sampai dengan pada saat penyaluran. Walaupun tetap ditemukan ada keluhan di lapangan, namun itu bukan disebabkan kurangny komunikasi.

Organisasi Pelaksana

Dengan melibatkan organisasi pelaksana yang efektif, penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan dapat berjalan lebih lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Komunikasi yang terjalin bagus antara sesama pelaksana program BLT memudahkan



implementasi program mulai dari tahap sosialisasi hingga penyaluran dana. Dari informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara dan observasi, mulai dari Dinas Sosial PMD sampai ke aparat pemerintah Nagari yang berada di lini terdepan berhadapan dengan masyarakat sebagai penyalur BLT dana desa, komunikasi berjalan dengan baik. Melalui komunikasi yang baik ini, akan meminimalisir terjadinya kesalahan baik pada waktu pendataan untuk menetapkan keluarga sasaran penerima BLT, sampai dengan pada saat penyaluran. Walaupun tetap ditemukan ada keluhan di lapangan, namun itu bukan disebabkan kurangnya komunikasi.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam konteks penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan, disposisi yang positif dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terlibat sangat penting. Disposisi yang baik akan memberikan dorongan untuk menjalankan program dengan integritas, motivasi tinggi, dan fokus pada hasil yang diinginkan, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan secara efektif dan efisien.

Adanya beberapa informasi yang beredar di tengah masyarakat berbagai daerah dan di berbagai media tentang adanya pemotongan yang terjadi pada dana BLT hanya bersifat kasusistis. Terlihat dari wawancara dan observasi serta informasi yang didapat dari informan baik di tingkat nagari sampai tingkat kabupaten bahwa pemotongan dana BLT tidak terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Tidak ada satu orang informan pun yang mengatakan adanya pemotongan dana BLT untuk alasan apapun. Ini memperlihatkan bahwa kejadian pemotongan dana BLT ini tidak bisa digeneralisasi terjadi di semua daerah, tetapi hanya segelintir. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa kebijakan BLT dana desa pada masa pandemi covid-19 tidak kompeten karena menyalahi aturan yang ada.

Lingkungan

Pentingnya pemahaman terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan adalah untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan memahami faktor-faktor lingkungan tersebut, pihak terkait dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul, merancang strategi yang sesuai, serta menjalankan kebijakan dengan responsif dan efektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Efektifitas Pelaksanaan Penyaluran BLT

Dengan memperhatikan ke 6 aspek yang mempengaruhi keberhasilan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program BLT pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan, ditinjau dari Model Van Meter dan Van Horne, sudah cukup efektif. Pendekatan yang komprehensif dalam mengelola program ini telah memungkinkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, komunikasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya yang memadai, koordinasi yang baik, disposisi yang positif, dan perhatian terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemilihan penerima dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan objektif, sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyaluran disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program. Selanjutnya dengan adanya sumber daya yang cukup, proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien.

Kendala Penyaluran BLT Covid-19

Beberapa kendala dalam proses penyaluran BLT Covid-19 diantaranya besarnya biaya transportasi sungai bagi warga yang berada di nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah ,dan Lubuk Ulang Aling Selatan di Kecamatan Sangir Batang Hari, menjadi beban tambahan bagi warga dalam mengakses pusat penyaluran BLT. Selanjutnya kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa wilayah, seperti wilayah Tandai, Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir juga menjadi kendala dalam penyaluran BLT. Terbatasnya kuota dapat menjadi faktor pembatas, meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan yang terakhir dalam situasi di mana Dinas Dukcapil memberlakukan work from home atau kerja dari rumah, proses pengurusan dokumen menjadi terhambat. Pengurusan dokumen yang tidak lancar dapat menyebabkan penundaan atau kesulitan dalam proses verifikasi data penerima bantuan. Implementasi program BLT pada masa pandemi covid-19 mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Tidak ada satupun penolakan program BLT ini di lapangan walaupun beberapa kali pelaksanaan pemberian bantuan terkendala karena persoalan verifikasi data penerima. Sebagaimana bantuan lainnya yang telah digelontorkan oleh pemerintah, masyarakat selalu berharap untuk mendapatkannya, tak terkecuali BLT dana desa ini. Kondisi sosial ekonomi yang cukup sulit pada masa pandemi covid, memang ada menimbulkan kecemburuan pada sebagian masyarakat yang tidak menerima bantuan dikarenakan persoalan seperti belum memiliki Kartu Keluarga dan surat Keterangan Domisili belum bisa dikeluarkan oleh Wali Nagari dengan alasan waktu domisili belum mencapai enam bulan.

Kesimpulan

BLT merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan finansial kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Implementasi kebijakan BLT di Kabupaten Solok Selatan berjalan dengan baik dan efektif. Dalam proses implementasi kebijakan BLT, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kesuksesan program tersebut. Pada penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni : besarnya biaya transportasi bagi beberapa nagari, kondisi jalan yang rusak, terbatasnya kuota bantuan, dan pengurusan dokumen kependudukan yang terhambat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya yang strategis, seperti memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan akses transportasi, memperluas kuota bantuan, dan mengadopsi solusi alternatif dalam pengurusan dokumen kependudukan. Melalui implementasi kebijakan BLT Covid-19, diharapkan masyarakat Kabupaten Solok Selatan dapat merasakan manfaat perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan BLT juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan Akses Transportasi: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu berupaya untuk meningkatkan akses transportasi ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan mempertimbangkan program subsidi transportasi bagi warga yang membutuhkan.
2. Perbaiki Infrastruktur Jalan: Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Pemeliharaan dan perbaikan jalan yang baik akan memudahkan petugas dalam proses



- penyaluran BLT dan mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh warga penerima.
3. Peningkatan Kuota Bantuan: Untuk memastikan bahwa bantuan mencapai semua warga yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu memperluas kuota bantuan. Dalam mengalokasikan anggaran, perlu dipertimbangkan jumlah warga yang terdampak dan kriteria penerima bantuan agar tidak ada warga yang terlewatkan.
 4. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi: Dalam pelaksanaan kebijakan BLT, penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Hal ini akan memastikan informasi yang akurat disampaikan kepada masyarakat, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan efisiensi proses penyaluran.
 5. Digitalisasi Pengurusan Dokumen: Dalam situasi di mana Dinas Dukcapil memberlakukan work from home, perlu dipertimbangkan digitalisasi pengurusan dokumen kependudukan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi pengurusan dokumen secara online, sehingga warga dapat mengajukan permohonan dan memperoleh dokumen dengan lebih mudah.
 6. Evaluasi dan Pemantauan Rutin: Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Covid-19. Evaluasi tersebut meliputi penilaian terhadap kinerja pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan keberlanjutan program. Pemantauan rutin akan membantu mengidentifikasi masalah secara cepat dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Pembimbing dan Pembahas Ahli Universitas Terbuka, serta segenap jajaran Pemerindah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah banyak membantu selama proses penelitian.

Daftar Pustaka:

- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8(02), 132–144.
- Anjarwati, S., Setyoningrum, N., & Soebiantoro, S. (2021). The evaluation of COVID-19 BLT distribution in Blitar regency. *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*, 6(2), 39–48. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/jares/article/view/1712>
- Ansyari, R., Sayuti Murakhman, & Herman, M. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 Di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. *Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*, 3(1), 53–56. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8033>
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kapatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 9(5), 261–272.
- Fitriani, A. S., Iriani, N. I., & Dwi Susanti, R. A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 203–212. <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.3030>
- Hidayat, A. R. N. (2021). Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Undergraduate Thesis*, 1(1), 1–157.



- Ilhamdatun, L. (2021). Program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Desa Ketangga, Kecamatan Suela *Undergraduate Thesis*.
- Khotimah, H., Situmorang, L., Purba, R., & Kunci, K. (2022). Persepsi Masyarakat Mengenai Proses Pemberian Bantuan Tunai Covid-19 Di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2022(1), 155–167.
- KOMPAK. (2021). Tata Kelola Dan Penyaluran BLT-DD: Studi Kasus di Bondowoso dan Bima. In *Kompak - Bappenas*.
- Kurniawan, A. (2020). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19 : Cerita Dari Desa. *Catatan Penelitian SMERU*, 1(4), 1–8.
- Maulya, P., Samri, Y., Nasution, J., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143–152. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i2.1601>
- Mukarrama. (2022). Kebijakan Program bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Undergraduate Thesis*, 1(1), 1–12.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi JPENSI*, 6(3), 263. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Nirwana, K. P., Sakir, S., & Sutan, A. J. (2022). Analisis Kebijakan BLT Dan Desa dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada Sektor Desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 137–150. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.15135>
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *Jurma - Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 166. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Prihandini, Y. L. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Massa Pandemi Covid-19 Di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 55–63.
- Rahman, A., & Kisworo, Y. (2021). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Legalita*, 3(1), 1–23.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Redana, D. N., & Supratta, I. N. (2022). Evaluasi Program BLT-Dana Desa kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupatten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol*, 14(2), 39–54.
- Saputra, A. D., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi pada Pulo Tegalsari RW 07 RT 10 Kota Surabaya). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(06), 1–23.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60.
- Syahid Jayana, H., Dahtiah, N., & Gunawan, A. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai



- Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Pandemi Covid 19 di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4118>
- TNP2K. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana desa. *Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1–8.
- Wayan Mastana, I., Ayu Putu Sri Widnyani, I., & Ilmiah Magister Administrasi Publik, J. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Widya Publika. *Jurnal Widya Publika*, 10(1), 58–76.
- Windarti, P. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Muara Jalai. *Undergraduate Thesis*, 33(1), 1–12.